

IMPLIKASI PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGKA

Wulpiah

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia
ulpiah2018@gmail.com

Abstract: This empirical research is intended to analyze the effect/implication of KUBE program to economic empowerment and community welfare at Bangka Regency. The implementation of variable (x^1) was measured by three indicator variables namely theoretical and technological support, the diversity of the target group's behavior and the desired level of behavior change. Structure of KUBE program and implementation process (x^2) were measured by clarity and consistency of KUBE program objectives, its accuracy and allocation of funding sources. External factor variables that influence the implementation of KUBE program (x^3) were measured by five indicator variables; socio economic, public support, constituents, government support and commitment. This research is a quantitative research with descriptive analysis techniques, and inferential analysis using Multiple Linear Regression, and SPSS 23.0 software. The population of this research is some KUBE which spread in several villages in Bangka Regency with 122 groups across 8 sub districts. The sample of the study is 5 KUBE with 53 members at Sungailiat, Mendo Barat, dan Merawang Sub district. The result of the study showed that the implementation of the KUBE did not affect the economic empowerment and welfare of people in Bangka regency. On the other hand, structure variable of KUBE program implementation affects the economic empowerment and welfare of people in Bangka regency. Moreover, the external factor variables that the influence the implementation of the KUBE program affects the economic empowerment and welfare of people in Bangka regency.

[Kajian empiris ini dimaksudkan untuk menganalisis implikasi pelaksanaan program KUBE terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Secara implementatif penelitian ini menggunakan variabel pelaksanaan KUBE (x^1), variabel struktur proses implementasi program KUBE (x^2) dan variabel faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE (x^3). Riset ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif, dan inferensial, menggunakan Regresi Linear Berganda, dan bantuan

software SPSS 23.0. Populasi penelitian ini adalah KUBE yang tersebar di beberapa desa/kecamatan di Kabupaten Bangka berjumlah 112 kelompok yang tersebar di 8 kecamatan. Sampelnya sebanyak lima KUBE dengan 53 anggota yang ada di Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Mendo Barat dan Kecamatan Pemali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel implementasi program KUBE tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Variabel struktur proses implementasi program KUBE berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Sedangkan variabel faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka.]

Keywords: Implementation, KUBE, Economic Empowerment and Community Welfare

A. Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan besar yang dihadapi Negara dan memerlukan penanganan yang serius. Menurut Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batasan kemiskinan (*poverty threshold*).¹ Mengingat permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah kompleks, pada tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Lebih lanjut fenomena kemiskinan di Indonesia tersebar pada setiap propinsi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan persentase yang berbeda-beda. Salah satunya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, meskipun bukan merupakan daerah tertinggal, kemiskinan di propinsi ini mengalami kenaikan setiap tahun. Hingga tahun 2017, total kemiskinan mencapai 74,09 atau dengan presentase sebesar 5,20%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 71,07 atau 5,04% yang tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Provinsi kepulauan Bangka Belitung sendiri terdiri atas tujuh kabupaten/kota, diantaranya Pangkalpinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung dan Belitung Timur. (BPS.go.id).

Berdasarkan data BPS Kabupaten dan Kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa selama tahun 2002 hingga 2018 terjadi peningkatan kemiskinan, realitas ini tentu tidak sejalan dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan adanya kendala yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mensukseskan program yang telah dicanangkan, sehingga pemerintah mampu mengatasi kemiskinan khususnya di Kabupaten Bangka.

¹ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 58.

Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah adalah Program Kelompok Usaha Bersama (selanjutnya akan disingkat KUBE). KUBE merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Kabupaten Bangka termasuk salah satu objek binaan dari Dinas Sosial yang menjalankan program KUBE. Pada tahun 2016 sebanyak 5 KUBE terdiri dari 53 anggota/orang di Kabupaten Bangka mendapat bantuan dana melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka berharap adanya peningkatan bantuan setiap tahun agar setiap program sosial yang sudah direncanakan berjalan sesuai harapan. (Bangkapos.com). Hasil wawancara dengan Ibu Ester² selaku Pembina PKH Kabupaten Bangka mengatakan bahwa jumlah kelompok usaha bersama penerima dana stimulan dari Kementerian Sosial pada tahun 2018 sebanyak lima puluh tiga (53) anggota/orang yang tergabung dalam lima (5) KUBE. Adapun jenis usaha yang dilakukan dan dikelola sesuai dengan kemampuan kelompok seperti usaha pertanian, peternakan, warung dan sebagainya.

Jika ditelisik pada tataran implementasinya, hasil observasi menunjukkan bahwa KUBE di Kabupaten Bangka tidak selalu berjalan mulus, banyak kendala yang dihadapi dalam upaya memaksimalkan agar program ini tepat sasaran, namun “mayoritas” program ini belum berjalan efektif. Indikasinya sebagian masyarakat yang ikut serta dalam program KUBE tidak dapat melaksanakan programnya secara berkelanjutan. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan keuangan dan tenaga kerja terampil, kurangnya pemahaman bagi penerima bantuan untuk mengalokasikan modal yang sudah diterima, kurangnya pengawasan dari Dinas Sosial, kurangnya motivasi untuk bekerja secara kelompok. Terakhir, keberadaan program KUBE belum sepenuhnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima bantuan.

² Ester, *Wawancara*, Sungailiat 16 Juni 2019,

Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif terkait pelaksanaan program KUBE di Kabupaten Bangka, apakah program ini sudah tepat sasaran, manajerialnya sudah baik dan apakah berdampak pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat? Aspek-aspek inilah yang menjadi *concern* tulisan ini, sehingga dapat teridentifikasi persoalan-persoalan kemiskinan dan ditemukan solusinya melalui program KUBE.

B. Kajian Kepustakaan

Sepengetahuan penulis kajian tentang implementasi KUBE dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sudah banyak dibahas sebagai karya ilmiah. Namun agar tidak terkesan menduplikasi penelitian yang sudah ada, maka penulis akan melakukan telaah dan klasifikasi terhadap beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Hasil penelitian Ahmad Imaduddin dkk³ mendeskripsikan dan menganalisis bahwa secara implementatif program ini masih dihadapkan pada mekanisme/prosedur administrasi yang birokratis dan melibatkan berbagai unsur pelaksana. Mengingat program pemberdayaan fakir miskin pada KUBE Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara ini sudah cukup berhasil, meskipun hasil yang dicapai belum optimal. Namun secara keseluruhan program tersebut sudah sesuai target, terutama terhadap penyaluran dana sudah tepat sasaran atau diberikan kepada yang warga miskin yang tergolong dalam KUBE. Selanjutnya dari segi besarnya bantuan dana juga sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tuty Movreynta⁴ dalam penelitiannya mendeskripsikan bahwa implementasi program KUBE tani belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan belum sepenuhnya mampu memperbaiki kesejahteraan kelompok tani khususnya, dan petani lain pada umumnya. Program bantuan modal KUBE ini kurang disosialisasikan sehingga tidak menyentuh langsung sampai kepada anggota kelompok. Oleh karena

³ Imaduddin, Ahmad Sutaji, Hartuningsih, *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara di Kota Samarinda*, (Samarinda, Administrative Reform, 2016), hlm. 351-352

⁴ Tuty Movreynta, *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tani di Dusun III Desa Pematang Lalang Kabupaten Deli Serdang*, (Skripsi, hlm. 17

itu banyak anggota kelompok yang tidak memahami secara jelas program KUBE yang melibatkan mereka, begitu pula dengan tahap pembinaan dan evaluasi juga belum dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya Mantiri dalam penelitiannya mengevaluasi implementasi program KUBE masih belum maksimal hasilnya, informasi belum tersebar secara merata kepada seluruh masyarakat miskin, proses administrasi dengan birokrasi yang panjang dan ketat sehingga perlu waktu yang lama untuk memproses suatu rencana anggaran. Idealnya jika proses sudah baik dilaksanakan dengan adanya keselarasan antara acuan kerja dengan pelaksanaan dilapangan. Pada dasarnya manfaat program usaha melalui KUBE telah dirasakan secara merata oleh seluruh anggota penerima bantuan, namun pencapaian tingkat keberhasilan masih belum maksimal, sehingga masih diperlukan pembenahan dan pendampingan secara komprehensif.⁵

Anwar⁶ dalam penelitiannya menganalisis eksistensi KUBE di lapangan tidak bertahan lama, usaha yang dibangun tidak berkembang. KUBE tidak cukup efektif sebagai instrumen penanganan fakir miskin, hal ini dikarenakan pembentukan KUBE yang bersifat dadakan, minimnya sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan, cenderung *top down*, salah sasaran, jenis usaha kurang sesuai dengan sumber daya lokal dan budaya masyarakat, manajemen usaha kurang tepat, pembagian kerja dirasa tidak adil, bibit terlalu kecil, pendamping kurang handal dan pengawasan belum optimal.

Penelitian Febriana⁷ mendeskripsikan penyelenggaraan pemberdayaan keluarga melalui KUBE Srikandi meliputi: (a) peningkatan pengetahuan dan keterampilan baru yang menunjang kegiatan usaha dan pengembangannya; (b) peningkatan pendapatan dari pembagian hasil usaha kelompok; (c) adanya inisiatif untuk membuka dan mengembangkan usaha secara mandiri; (d) terjalinnya rasa kekeluargaan dan keakraban sosial baik antar anggota kelompok maupun masyarakat sekitar. Pada tataran implementasinya terdapat faktor pendukung program

⁵ Aat Qodrat, Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Padeglang, *Skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Ageng Tirtayasa, Serang, 2017), hlm. 73

⁶ Anwar Sitepu, Analisis Kelompok Usaha Bersama sebagai Instrumen Penanganan Kemiskinan, (Kemensos, *Sosio Informa*, Vol 2, Nomor 01, (Januari-April, 2016), hlm. 58.

⁷ Febrina Permata Ika, Ika, F, P., (2015) Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 15-16.

Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka

pemberdayaan keluarga ini meliputi: (a) semangat dan motivasi anggota, (b) dukungan keluarga dan masyarakat, dan (c) dukungan bantuan *corporate social responsibility*, sedangkan faktor penghambatnya meliputi: (a) terdapat anggota yang sudah tua, (b) pengalaman anggota yang terbatas, dan (c) adanya kesibukan dari anggota.

Selanjutnya penelitian Irmayani dkk⁸ menjelaskan bahwa tahapan kegiatan dalam proses pemberdayaan keluarga melalui KUBE belum semuanya dilaksanakan, sebab pengembangan KUBE dipengaruhi oleh kesesuaian tahapan kegiatan KUBE dengan panduan. Pemahaman usaha kelompok masih sebagai wacana, karena dalam temuan lapangan diketahui fakta bahwa kegiatan usaha dilakukan secara individual. Dampak program pemberdayaan keluarga melalui KUBE terhadap ketahanan sosial keluarga dapat meningkatkan penghasilan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, meningkatkan kemampuan berorganisasi dan meningkatkan kesetiakawanan antara anggota kelompok, meningkatkan rasa kebersamaan dan memelihara serta meningkatkan usaha keluarga.

Kajian diatas bersifat kualitatif, namun kajian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis secara kuantitatif dengan variabel yang digunakan lebih luas, tidak hanya membahas konteks pelaksanaan KUBE dan kendalanya, namun mengeksplorasi secara komprehensif implikasi program tersebut secara nyata dan terukur bagi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan mengacu pada teori dan indikator implementasi kebijakan publik.

C. Kajian Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan seperangkat keputusan strategis untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, tujuan, prinsip dan garis pedoman manajemen dalam upaya mencapai sasaran. Kebijakan

⁸ Irmayani dkk, *Efektifitas Pelayanan KUBE dalam Perspektif Ketahanan Sosial, Keluarga: Studi Evaluasi Pemberdayaan Keluarga Melalui KUBE*, (Kemensos, P3KS Press, 2010), hlm. 25.

yang diambil pemerintah disebut dengan kebijakan publik (*policy term*). Kebijakan publik sering ditukar dengan istilah tujuan program, keputusan, undang-undang, standar dan *grand design*.⁹

Dari berbagai referensi dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam literasi internasional disebut *public policy* artinya suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama dan harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.¹⁰

Kebijakan publik (*policy term*) memiliki lingkup yang luas, hal ini dikarenakan kebijakan publik mencakup berbagai bidang dan sektor diantaranya ekonomi, sosial, budaya, hukum dan politik. Kebijakan publik dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah dan sebagainya. Selanjutnya Carl Friedrich (dalam Agustino)¹¹ mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Sebuah kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak yang sesuai dengan tujuan diinginkan, meskipun terkendala konsistensi implementasi.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan dampak atau akibat dari adanya penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Hal ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan (2003), implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk

⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Jakarta: Medio Pressindo, 2007), hlm. 15.

¹⁰ Wrihatnolo, Randy R dan Rian Dwidjowidjoto, *Kebijakan Publik Unruk Negara Berkembang: Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 265-266

¹¹ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hlm. 7

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Menurut Tuty¹² implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi ditetapkan, implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Selanjutnya Ramdhani¹³ menjelaskan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya aspek kewenangan, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik, diantaranya konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi. Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif yang meliputi evaluasi *ex-ante*, *on going*, dan *ex-post* atas pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Howlett dan Ramesh (dalam Suharto)¹⁴ implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hakekat dan perumusan masalah kebijakan itu. Dalam perumusan kebijakan publik diperlukan partisipasi masyarakat, agar muncul kebijakan publik yang mampu melindungi, mengayomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyeimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik seringkali dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang juga membutuhkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Pembangunan dan pemberdayaan tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa kebijakan publik yang diambil untuk

¹² Tuty Movreynta, *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama*

¹³ Abdullah Ramdhani dan Muhamad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, (Bandung Jurnal Pulik, Vol. 11, Nomor. 01, 2017), hlm. 3.

¹⁴ Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia; Menggagas Model Jaminan Sosial*, (Bandung; Alfabeta, 2009), hlm. 65.

meningkatkan hal tersebut, antara lain adanya program pengentasan kemiskinan. Selanjutnya Putra¹⁵ dalam penelitiannya membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan menyatakan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah program kebijakan publik, hal ini dikarenakan untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat tidak mungkin dapat dilakukan sendiri atau upaya dari satu pihak saja. Selain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, terdapat program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok.

Dalam konteks pemberdayaan, Pranarka dan Vidhyandika menjelaskan pemberdayaan lebih diarahkan pada pemberian aset dan kemampuan pada kelompok miskin sehingga mereka mampu berpartisipasi dan mengontrol akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi mereka. Ada dua hal penting dalam pengertian ini yaitu pemberdayaan dalam proses pemberian aset dan aksesibilitas bagi kelompok miskin terhadap berbagai sumber yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹⁶

Pemberdayaan memiliki dua elemen pokok yaitu kemandirian dan partisipasi, yang diartikan sebagai proses aktif, inisiatif dan diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) agar mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Adapun fokus aspek partisipasi adalah memutuskan, bertindak, selanjutnya merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar. Dalam konteks partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan peran secara maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat. Dalam konteks ini Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat, sebab partisipasi

¹⁵ Putu Bayu Putra Mahendra, Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Terhadap Produktifitas Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat, (*Internasional Journal of Social Science and Business*, (Vol. 1, Nomor 1, 2017), hlm. 10.

¹⁶ Joyakin Tambupolon, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok; Kasus Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, *Disertasi*, (Bogor, Institut Pertanian, 2006) hlm. 55

masyarakat akan bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.¹⁷

Totok Mardikanto¹⁸ menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya dalam membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta mengembangkannya. Sasaran pemberdayaannya adalah sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan atau pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah selaku penentu kebijakan publik yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yang mereka miliki.

Adapun fokus penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui KUBE. Inisiasi pembentukan KUBE dimulai melalui: *Pertama*, proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulan dan pendampingan. Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE) sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan berkelompok masyarakat akan memiliki wadah dalam melakukan kegiatannya. *Kedua*, dengan adanya KUBE, masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan untuk membuat kegiatan yang pada akhirnya akan dapat mendatangkan hasil keuangan. Ketiga Kelompok Usaha Bersama juga akan memberikan manfaat yang lebih bagi para nggotanya, baik manfaat secara finansial, maupun manfaat kebersamaan dan kegotong-royongan yang saat ini sudah mulai pudar di masyarakat desa.

3. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Munculnya gagasan tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Potensi ini sifatnya sangat beragam, ada potensi yang dapat dikembangkan secara individual tanpa bantuan atau

¹⁷ Isma Rosyda dan Fredian Tonny Nasdian, *Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan*, (Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, 2011), hlm. 54.

¹⁸ Totok Mardikanto, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 48.

intervensi orang lain dan ada juga potensi dengan bantuan orang lain melalui pendekatan kelompok. Kadang kala seseorang atau sekelompok orang kurang menyadari adanya potensi yang dimiliki dan jika dikembangkan akan melebihi kemampuan orang biasa. Oleh karena itu karakteristik individu menjadi unsur penting dan diperkirakan ikut mempengaruhi proses pemberdayaan. Dengan karakteristik tersebut, maka pemberdayaan melalui KUBE diharapkan dapat mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki anggota KUBE. Program KUBE dalam konteks pembangunan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yaitu dapat menjadi *problem solving* masalah sosial dengan mengadakan perbaikan terhadap suatu kondisi seperti masalah kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial yang diperlukan dalam menciptakan kondisi yang lebih baik.¹⁹

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Lebih lanjut implementasi program KUBE-FM merupakan pelaksanaan program KUBE dalam Pemberdayaan Fakir Miskin adalah Program Nasional yang merupakan suatu upaya penanggulangan kemiskinan, yang diberikan kepada setiap Daerah Kota/Kabupaten yang program tersebut dilakukan dengan pendekatan KUBE yaitu melalui pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan. Pada tahap mengembangkan KUBE, P2FM dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan penguatan modal usaha, yang memfasilitasi kelompok fakir miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha

¹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*, (Jakarta; DIRjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan, 2010), hlm. 11-12.

Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka

Bersama untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan meningkatkan aktivitas sosial kelompok.

Adapun implikasi pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE menurut Sadono Sukirno dalam Teori Schumpeter berkeyakinan jika pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif atau golongan *entrepreneur*. Golongan ini berarti golongan masyarakat yang mengorganisasi dan menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu cara dalam membangun ekonomi pada Negara yang kuat, karena jika masyarakat dalam suatu Negara mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi, maka perekonomian juga akan meningkat.²⁰

4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. *Pemberdayaan Masyarakat*

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi *basic needs* atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut dan konsep ini sebagai alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan masa lalu. Terminologi ini berkembang sebagai upaya para *expert* dan praktisi untuk mencari apa yang disebut Friedman (1992) “*alternative development yang menghendaki inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.²¹

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dalam konteks ini perlu dibedakan istilah keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa

²⁰ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 25.

²¹ Haryanti Roebyantho dkk, *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*, (Jakarta; P3KS Press, 2011), hlm. 33.

dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Adapun sumber keberdayaan masyarakat secara fisik adalah sehat fisik dan mental, terdidik, kuat serta inovatif. Selanjutnya nilai-nilai intrinsik seperti nilai kekeluargaan, kegotong royongan, kejuangan. Sedangkan pemberdayaan merupakan suatu sistem yang berorientasi pada manusia dengan mengedepankan asas partisipas, jaringan kerja, kemandirian dan keadilan yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses) sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, meskipun pemberdayaan bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, namun secara implisit diartikan penegakan demokrasi ekonomi. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatanya; menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggungjawab. Selanjutnya urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Berdasarkan uraian diatas, secara teoritis pemberdayaan merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan, mampu berdiri sendiri dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki; secara praktis pemerintah berupaya melakukan penanganan kemiskinan melalui program regular pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan KUBE sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Program KUBE Di Kabupaten Bangka

Adapun dasar hukum pelaksanaan program KUBE adalah UUD 1945 Pasal 27 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 34, menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara, Pasal 28 tentang setiap orang berhak untuk berkomunikasi

dan memperoleh informasi. Selanjutnya UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1982 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. Dengan regulasi yang ada, maka program KUBE bertujuan mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Sedangkan sasaran program KUBE adalah masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan penghasilan, pendidikan, perumahan, keterampilan, hubungan sosial dan masyarakat yang mempunyai keinginan kuat untuk maju dan mandiri.

Selanjutnya jika dilihat dari proses pembinaan dan proses pendampingan, pendekatan kelompok dalam proses pemberdayaan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pendekatan individual baik dari segi biaya, tenaga maupun waktu. Hal ini dengan asumsi bahwa satu orang pendamping dapat melayani sekaligus beberapa orang anggota KUBE daripada melayani secara individual, dan mereka juga dapat saling bekerjasama. Secara implementatif anggota yang satu dapat menjadi contoh, teladan, motivator, supervisor tanpa harus diperintah. Pola seperti ini dianggap berkontribusi besar dalam mewujudkan *team work* antar anggota KUBE. Lebih lanjut jika adanya anggota KUBE yang kurang memiliki kemampuan dari segi pendidikan, keterampilan maupun pengalaman dapat melakukan *sharing* pengalaman yang dimiliki oleh anggota lain, sehingga ada *enrichment of knowledge* dan terjadi proses pembelajaran secara berkelanjutan selagi mereka masih dalam KUBE, sehingga proses transformasi keahlian ini mendukung keberhasilan KUBE dan implikasinya mengindikasikan pemberdayaan masyarakat melalui program ini dapat terwujud.

Dalam implementasi program KUBE yang ada di Kabupaten Bangka yang sudah berjalan sejak tahun 2017, terdapat beberapa kendala internal dan eksternal. Secara internal: *pertama*, terdapat anggota KUBE yang tidak aktif/tidak berpartisipasi dalam kelompok, sehingga diambil kebijakan dan kesepakatan dalam rapat/pertemuan kelompok. *Kedua*, ada perbedaan pendapat terkait bagi hasil yang diterima anggota. Sedangkan kendala eksternalnya berupa lingkungan dan cuaca, apalagi KUBE pada bidang pertanian dan peternakan tentu hal ini berpengaruh terhadap pendapatan pengurus dan anggota KUBE. Hal ini dipertegas oleh Ibu Ester

selaku pendamping KUBE di Kabupaten Bangka, mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya dinamika kelompok yaitu motivasi, interaksi sosial, kepemimpinan dalam kelompok, norma-norma kelompok sehingga terkadang muncul dinamika dalam pelaksanaan KUBE.

Terkait dengan saran, sebagai bahan evaluasi program ini agar KUBE yang *notabene* merupakan program pemerintah pusat dan belum sepenuhnya masyarakat miskin menikmatinya. Untuk langkah selanjutnya dapat diusulkan agar pemerintah daerah (pemerintah desa) dapat menginisiasi program sejenis ini, agar ada akselerasi untuk meminimalisir angka kemiskinan. Sebab jika hanya mengacu pada program dari pemerintah pusat alokasinya terbatas dan cenderung agak lama proses birokrasinya dan tentu implikasinya program KUBE tidak dilaksanakan secara maksimal. Mengingat idealnya program ini diorientasikan untuk meningkatkan motivasi agar usaha yang dijalankan lebih maju dan *sustainable*, dapat meningkatkan interaksi dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya sosial dan ekonomi lokal, memperkuat budaya *entrepreneurship* dan mengembangkan akses pasar, melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan menjamin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait.

Eksistensi KUBE dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin, meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan sosial seperti terciptanya hubungan yang harmonis, pengembangan kreatifitas, munculnya semangat dalam berwirausaha sehingga tercipta sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggungjawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pendekatan KUBE diharapkan kelompok sasaran mau mengeksplorasi, memanfaatkan sumberdaya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Potensi ini meliputi pemanfaatan lahan untuk pertanian, peternakan, pemanfaatan tenaga kerja pada KUBE yang dikelola. Pola ini diharapkan dapat mengintegrasikan sumber tersebut pada kepentingan kelompok usaha. Sebab mereka

berwewenang dalam mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE berhasil dengan baik sehingga pendekatan KUBE merupakan pendekatan yang relevan dalam pemberdayaan kelompok miskin.

2. Hasil Uji Inferensial

1. *Pengaruh Variabel Implementasi Program KUBE terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bangka*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KUBE secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t yang didapat nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ($1,755 \leq 2,010$), sehingga H_0 diterima. Secara teoritis Suharto (2009) menjelaskan bahwa dalam konteks implementasi KUBE, peran pendampingan sosial diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti merancang program perbaikan kehidupan ekonomi, mobilisasi sumber daya setempat, menemukan solusi masalah-masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan pihak lainnya yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu pendampingan KUBE merupakan salah satu strategi dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Selain itu eksistensi kinerja pendampingan merupakan salah satu indikator terkait uluefektifnya program KUBE dalam pemberdayaan fakir miskin. Pendampingan diartikan seseorang yang bertugas untuk menjalin hubungan antara pendamping dengan KUBE dan masyarakat sekitarnya dalam rangka menemukan solusi, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kinerja pendamping cukup menunjang terkait pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin pada KUBE. Dengan kemampuan *leadership* yang mereka miliki ditopang dengan *skill* yang sesuai keahliannya menghasilkan produk KUBE maksimal dan implikasinya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Secara implementatif peran pendamping dimulai dari proses penyusunan proposal pengembangan usaha juga mengarahkan terkait pemanfaatan dana bantuan usaha untuk ekonomi produktif pada tiap-tiap kelompok yang dibinanya.

Selanjutnya dalam penanganan masalah kemiskinan, masyarakat yang mendapatkan bantuan seringkali merupakan kelompok yang tidak mampu. Oleh sebab itu guna merealisasikan pelaksanaan program KUBE, maka hadirnya pendamping sosial dapat membantu mengoptimalkan KUBE bagi masyarakat, pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap pendamping KUBE dengan cara melakukan *training* sehingga mereka profesional. Namun secara implementatif hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suradi (2007) menjelaskan bahwa dari *sisi input* sebagian besar KUBE tidak memenuhi kualifikasi karena penerima bantuan pengembangan sudah tidak memiliki aset dari usaha sebelumnya atau sudah tidak produktif lagi. Pola pemberdayaan para pendamping KUBE, jika dikaji dari aspek pelatihan pendamping dirasakan belum memadai dengan kebutuhan, belum memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan sosial dalam pendampingan. Dari *segi proses* menunjukkan seleksi pendamping KUBE belum tepat, proposal tidak sesuai dengan potensi lokal dan kurangnya sosialisasi program. Selanjutnya *monitoring* dan evaluasi belum dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kejelasan terkait tindak lanjut program. Sedangkan dari *sisi produk* bahwa aset maupun modal usaha anggota KUBE belum bertambah, demikian juga iuran kesetiakawanan sosial belum dilaksanakan.

Disamping itu diperlukan kecermatan karena setiap pengurus harus mengetahui mekanisme yang ditentukan berdasarkan pemanfaatannya yaitu sebagai pemberdayaan masyarakat miskin untuk biaya operasional terkait pemantauan dan pengendaliannya. Secara teknis masih adanya perbedaan persepsi dengan masyarakat warga miskin yang tergolong dalam KUBE dengan pihak pelaksana Dinas Sosial terhadap mekanisme pencairan dana untuk program KUBE masih dihadapkan prosedur yang masih panjang.

2. Pengaruh Variabel Struktur Proses Implementasi Program KUBE terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bangka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur proses implementasi program KUBE berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang didapat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,759 > 2,010$), sehingga H_0 ditolak. Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif yaitu semakin meningkat struktur proses implementasi program KUBE, maka akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini didukung oleh Joyakin Tambupolon dkk (2006) menjelaskan bahwa jika dilihat dari sifat kegiatan usaha, maka KUBE perlu dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: *KUBE Harian* seperti usaha toko sembako, pembuatan kue dengan sasaran masyarakat miskin dan non miskin; *KUBE Bulanan* seperti tanaman sayur-sayuran, perikanan, dengan sasaran masyarakat non fakir dan miskin; *KUBE Tabunan* dengan sasaran usaha ternak sapi, kambing dengan sasaran kelompok miskin. Lebih lanjut tingkat keberhasilan KUBE juga dipengaruhi struktur prosesnya seperti pembinaan kelompok, kepuasan anggota, kepemimpinan dan efektifitas kelompok, soliditas kelompok dan tujuan kelompok, sehingga berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dijadikan sasaran KUBE. Hasil penelitian Irmayani (2010) juga menjelaskan langkah-langkah dalam proses pemberdayaan keluarga melalui KUBE belum dilaksanakan oleh tenaga pelaksana khususnya di lapangan sehingga berdampak pada 'gagalnya' pelaksanaan KUBE.

Oleh sebab itu perlunya evaluasi pelaksanaan program KUBE sehingga memiliki nilai tambah bagi penanganan masalah kemiskinan diberbagai daerah. Selanjutnya Widiyanto (2013) dalam Ristinura Indrika, penelitiannya menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan belum optimal dan bisa dikatakan 'gagal'. Hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE mengungkapkan perlunya pembinaan dan penguatan kelompok melalui pelatihan, keterampilan dan penyuluhan, penguatan modal, pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif. Hasil penelitian ini didukung oleh Kiwondo dalam Nur'aini

(2005) mengemukakan kendala dalam proses implementasi KUBE adalah *cultural problem* artinya etos kerja masyarakat yang rendah dan adat istiadat yang tidak mendukung; *structural problem*, artinya adanya kebijakan pembangunan yang kurang mendukung proses pemberdayaan masyarakat seperti penyediaan permodalan, teknologi dan pasar. Imanuddin (2016) menjelaskan bahwa mekanisme/prosedur untuk pencairan bantuan dana stimulan bagi fakir miskin belum sesuai pelayanan seperti kesederhanaan, transparansi, efektif dan efisien. Sebab masih dihadapkan pada prosedur yang panjang atau birokrasi sehingga memerlukan waktu relatif lama.

3. Pengaruh Variabel Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Implementasi Program KUBE Terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bangka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang didapat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,035 > 2,010$), sehingga H_0 ditolak. Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif yaitu semakin meningkat. Faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE, maka akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Adapun efektifitas pelaksanaan program ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pencairan dana program dan sekaligus pemanfaatannya. Sebab pencairan dana pada program ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang kala memperpanjang birokrasi.

E. Penutup

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KUBE secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Selanjutnya struktur proses implementasi program KUBE, dan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka.

Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka

Ada beberapa rekomendasi terkait penyempurnaan penelitian ini dan menjadi keterbatasan peneliti lakukan sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat ditindaklanjuti antara lain: (1) Jumlah responden dalam penelitian ini perlu diperbanyak dan ruang lingkup penelitian tidak hanya pada tiga (3) KUBE kecamatan saja, tetapi dengan melibatkan banyak responden dan lingkup kajiannya lebih luas; (2) Penelitian ini hanya terbatas pada variabel pelaksanaan program KUBE, struktur proses implementasi program KUBE, dan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE saja, mengingat masih banyak faktor lain yang juga mempengaruhi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka, maka bagi peneliti selanjutnya, jika ingin mengembangkan penelitian ini, sebaiknya menambah variabel sosial ekonomi untuk menentukan karakteristik kemiskinan di daerah pedesaan dan variabel lainnya seperti dukungan pemerintah, guna mengetahui secara komprehensif regulasi dan model pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan; (3) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholder* seperti Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial agar mendesain model pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE untuk lebih tepat sasaran, utamanya mulai dari perencanaan program, realisasi program, *monitoring* dan evaluasi program serta peningkatan kapasitas pendamping KUBE. Kegiatan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien serta terukur, sehingga hasilnya maksimal; dan (4) Untuk Pemerintah Daerah agar berpartisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi program KUBE selanjutnya berupaya mengalokasikan dana untuk program sejenis, sehingga upaya akselerasi pengentasan kemiskinan didaerah dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Agustino, L, (2006), *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung; CV. Alfabeta.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, (2009), *Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, Jakarta; Gaung Persada.
- Dwidjowidjoto, dkk (2006), *Kebijakan Publik Unruk Negara Berkembang; Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Edi, S, (2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia; Menggagas Model Jaminan Sosial*, Bandung; Alfabeta.
- (2005), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia; Menggagas Model Jaminan Sosial*, Bandung; Alfabeta.
- Ester, *Wawancara*, Sungailiat 16 Juni 2019.
- Hartuningsih, Sutaji A, Imaduddin, (2016), *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin Binaan Dinas Sosial Wilayah Kecamatan Samarinda Utara di Kota Samarinda*, Samarinda, Administrative Reform.
- Ika, F, P, (2015) *Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi*, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Irmayani; dkk, (2010), *Efektifitas Pelayanan KUBE dalam Perspektif Ketahanan Sosial, Keluarga; Studi Evaluasi Pemberdayaan Keluarga Melalui KUBE*, Kemensos, P3KS Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, (2010), *Pedoman Kelompok Usaha Bersama*, (Jakarta; Dirjen Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan).
- Movreynta, Ty, *Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tani di Dusun III Desa Pematang Lalang Kabupaten Deli Serdang*.
- Mardikanto, T dkk, (2012), *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung; Alfabeta.
- Mahendra P, Bayu, (2017), *Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Terhadap Produktifitas Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat*, *Internasional Journal of Social Science and Business*, (Vol. 1, Nomor 1
- Nasdian, T Fredian dan Rosyda, I, (2011), *Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan*, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*.
- Qodrat, A, (2017), *Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Majasari Kabupaten Padeklang*, *Skrripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Politi, Universitas Ageng Tirtayasa, Serang.

Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka

Ramdhani, A dan Ramdhani, M, Ali, (2017), *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Bandung Jurnal Pulik, Vol. 11, Nomor. 01.

Roebyantho, H, dkk, *Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE*, (Jakarta; P3KS Press, 2011), hlm. 33.

Sitepu, A, (2016), Analisis Kelompok Usaha Bersama sebagai Instrumen Penanganan Kemiskinan, Kemensos, *Sosio Informa*, Vol 2, Nomor 01, Januari-April, 2016.

Sunartiningsih, A, (2004), *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*, Yogyakarta; Aditya Media.

Sukirno, S, (2007), *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tambupolon, J, (2006), Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok; Kasus Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama, *Disertasi*, Bogor, Institut Pertanian.

Winarno, B, (2007), *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Jakarta; Medio Pressindo.